

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : Tahun 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 bulan 3 tahun 2020 bertempat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	5	6	7
1.	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan kegiatan dan perjalanan dinas.	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbatas sampai setelah selesai diaudit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen
2.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengadaan Langsung	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
3.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26 - Standard AAIPi Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	5	6	7
		Pendistribusian Dokumen Audit.			
4.	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i,</li> <li>- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26</li> <li>- Standard AAIPi Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit</li> </ul>	Tak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan